

## Logika Peralihan Suara dalam Pilkada: Analisis Kepemimpinan Politik dan Nilai Demokrasi

Wawan Sobari<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Received: (21 Januari 2022)

Revised: (27 Juli 2022)

Published: (31 Oktober 2022)

### Abstrak:

Studi ini berangkat dari kegagalan petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Tahun 2020 di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian bertujuan mengungkap logika peralihan suara kepada kandidat penantang dengan mengeksplorasi kepemimpinan politik, kondisionalitas konteks lokal, dan refleksinya terhadap nilai-nilai demokrasi. Untuk itu, penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan metode analisis observasional dalam kajian kepemimpinan politik. Studi ini menemukan evaluasi kandidat berupa rendahnya kepuasan warga terhadap kinerja kepemimpinan kandidat petahana (2015-2020) sebagai alasan peralihan suara. Evaluasi menghasilkan pula persepsi negatif pemilih terhadap calon wakil bupati petahana karena sejumlah persoalan etis. Argumen penting lainnya karena kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat penantang. Nalar peralihan suara tersebut merefleksikan pemenuhan nilai-nilai demokrasi, yaitu nilai intrinsik, instrumental, kompetitif, partisipatif, dan deliberatif. Riset ini memperluas logika peralihan suara karena alasan kedekatan emosional. Dalam kajian perilaku memilih, kedekatan emosional bisa diinterpretasikan sebagai wujud keterikatan atau loyalitas yang membentuk persepsi pemilih tentang kandidat, dan memperluas teori keterikatan kepada partai politik. Pun, temuan tersebut berpotensi mengembangkan nilai demokrasi yang selama ini lebih banyak didominasi penjelasan rasional, seperti evaluasi kandidat. Demokrasi sebaiknya dipandang pula sebagai ruang ekspresi kedekatan emosional antara warga dan pemimpin. Aspirasi politik tak selalu berkonsekuensi pada janji materi, melainkan mencakup juga pemenuhan sisi emosional para pemilik suara.

### Kata kunci:

peralihan suara; kepemimpinan politik; nilai demokrasi; pilkada

### Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 di Jawa Timur dilaksanakan pada 19 kabupaten dan kota. Sebanyak 15 pilkada diikuti oleh kandidat petahana (calon yang sebelumnya menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah). Hasilnya, 10 calon petahana gagal memenangkan kembali posisinya sebagai kepala daerah. Sementara hasil pilkada pada 5 daerah dimenangkan oleh kandidat petahana.

---

### Korespondensi:

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Malang, Jawa Timur 65145.  
Email: wawansobari@ub.ac.id

Di antara hasil pilkada yang menunjukkan kekalahan kandidat petahana di Jawa Timur, Pilkada Kabupaten Blitar merupakan salah satu yang mengejutkan. Pasangan kandidat petahana (Rijanto-Marhaenis) dikalahkan oleh pasangan kandidat penantang (Rini-Rahmad). Keterkejutan tersebut karena pasangan kandidat petahana sebelumnya memenangkan pilkada dengan satu pasangan calon pada 2015. Saat itu, Pasangan Kandidat Rijanto-Marhaenis memperoleh suara SETUJU sebanyak 427.076 Suara (84,90 persen). Namun, dalam Pilkada 2020, pasangan kandidat petahana memperoleh 255.591 suara (41,2 persen). Perolehan suara tersebut kalah dari perolehan pasangan kandidat penantang yang meraih 365.315 suara (58,8 persen).

Kekalahan Pasangan Rijanto-Marhaenis dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020 tersebut mengejutkan. Selain karena pasangan itu merupakan calon petahana, keduanya dicalonkan oleh koalisi partai besar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Selain itu, kandidat penantang yang memenangkan kompetisi politik lokal ini merupakan figur baru dalam kontestasi politik Kabupaten Blitar.

Kegagalan kandidat petahana dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020 menimbulkan pertanyaan akademis, utamanya terkait penurunan suara yang cukup drastis (171.485 suara) dari Pilkada 2015. Mengapa terjadi peralihan suara (*vote shifting*) pada Pilkada 2020 dari Pilkada 2015? Untuk mendapat jawaban pertanyaan tersebut, studi ini mengeksplorasi jawaban dari para pemilih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dalam memilih pada Pilkada 2015 dan 2020.

Secara akademis, kajian tentang keberhasilan dan kegagalan petahana dalam pilkada belum intensif dilakukan. Di antara studi tersebut dilakukan (de Mesquita et al., 2005) yang menemukan, untuk bertahan dalam pemilu, seorang pemimpin (petahana) perlu menawarkan manfaat setidaknya sama dengan manfaat terbesar yang ditawarkan oleh penantang potensial. Khusus untuk kasus pilkada di Indonesia, (Sulistiyanto & Erb, 2009) menguraikan beberapa faktor yang terkait dengan logika “hadiah dan hukuman” yang dapat menyebabkan kelangsungan dan kegagalan petahana dalam pilkada selanjutnya. Sebaliknya, studi (Prasojo, 2016; 82) mengungkap keengganan Bupati Petahana Kabupaten Batang Yoyok Rio Sudibyo yang tidak mencalonkan kembali dalam Pilkada 2017 karena ingin memutus dinasti kepemimpinan daerah di wilayahnya.

Hasil penelitian sebelumnya oleh (Trounstone, 2009) mengungkap kemampuan petahana di kota-kota di Amerika bertahan dalam pemilu. Koalisi menggunakan 3 strategi yang menguntungkan petahana dalam pemilu lokal di Amerika, yaitu strategi bias informasi (*information bias*), bias suara (*vote bias*), dan bias kursi (*seat bias*). Dari tiga strategi itu, pemerintahan daerah di bawah pimpinan petahana secara umum mempraktikkan 2 kumpulan strategi yang ‘melegalkan’ benturan kepentingan dalam pemerintahan daerah. Pertama, koalisi mencapai kontrol melalui penggunaan sumber

daya pemerintah untuk tujuan politik (*patronage*). Kedua, koalisi lainnya memonopoli pemerintah dengan mengandalkan aturan yang membatasi kesempatan bagi oposisi dan populasi minoritas untuk berpartisipasi dalam pemilihan atau mengarahkan perubahan kekuasaan (*reform*).

Sementara studi (Sobari, 2017b) memperluas logika keberhasilan dan kegagalan petahana dalam pilkada dengan mengungkapkan bahwa populisme, rivalitas, dan *tangibility* adalah strategi inti bagi petahana yang berhasil mempertahankan jabatannya sebagai kepala daerah. Secara khusus, kemenangan seorang petahana bergantung pada kemampuannya dalam mengelola risiko persaingan, yaitu kemampuan mengelola dukungan dan oposisi baik dari aktor formal maupun informal melalui cara yang adil maupun tidak adil. Strategi-strategi ini, kemudian, mendorong keberhasilan taktik kemenangan berbasis patronase atau politik imbal balik untuk mempertahankan jabatan kepala daerah dalam pilkada.

Studi sebelumnya tentang Pilkada Kabupaten Blitar 2015 (Sobari, 2017a) yang hanya diikuti satu pasangan kandidat (Rijanto-Marhaenis) menemukan fakta menarik. Konstruksi personal seorang calon bupati (Rijanto) yang dikenal sebagai *blater* (Bahasa Jawa artinya ramah, mudah bersosialisasi) menjadi faktor yang berkontribusi membangun popularitas dan kesukaan hingga mendorong calon tunggal dalam pilkada. Berdasarkan studi terakhir, maka penting untuk didalami, mengapa banyak pemilih yang sebelumnya tertarik dengan karakter *blater* seorang calon bupati (Rijanto) pada Pilkada Kabupaten Blitar 2015 mengalihkan suaranya kepada pasangan penantang pada Pilkada Kabupaten Blitar 2020?

Guna menggali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan akademik tersebut, studi ini bertumpu pada analisis kepemimpinan politik. Studi ini mendefinisikan kepemimpinan politik sebagai kapasitas individu dalam menginjeksi gagasan, tujuan, dan visinya ke dalam kebijakan publik, baik merupakan inisiatif mandiri maupun hasil dari interaksi dengan aktor dan konteks di luar individu. Dalam kaitan pemilihan kepala daerah, kepemimpinan politik merujuk pada praktik kepemimpinan yang dilakukan petahana dalam memimpin Kabupaten Blitar (2015-2020). Definisi ini mencakup pula prospek kepemimpinan oleh penantang dalam Pilkada 2020.

Hasil penelusuran literatur (Elcock, 2001; Elgie, 2016; Hart & Rhodes, 2014) tentang teori-teori kepemimpinan politik menghasilkan tiga mazhab penjelasan. Teori ini bertumpu pada penjelasan tentang faktor yang mendorong kepemimpinan politik bekerja dan memiliki dampak kepemimpinan. Tiga cabang pemikiran tersebut, yaitu, pertama, teori yang bertumpu pada analisis faktor individu pemimpin dalam kepemimpinan politik (*individual-driven analysis*). Kedua, kepemimpinan politik merupakan variabel tergantung yang dipengaruhi faktor di luar individu pemimpin (*structure*). Ketiga, kepemimpinan politik merupakan hasil interaksi antara individu pemimpin dan konteks dimana ia memimpin (*interactionist paradigm*). (Elgie, 2016) membagi paradigma ini dalam 3 aliran, yaitu teori politik normatif (tuntutan pada pemimpin untuk menyeimbangkan antara kepemimpinan demokratis dan efektif),

perilaku kepemimpinan (*behavioural leadership*), dan dampak kepemimpinan (*leadership outcomes*) sebagai hasil interaksi antara kualitas personal pemimpin dan konteks yang dihadapinya.

Bila dikaitkan dengan kajian perilaku memilih dalam pemilu (*electoral behavior or vote choice*), studi ini berupaya menggali penjelasan tentang efek pemimpin terhadap *electoral behavior* atau *vote choice*. Secara komprehensif, Lobo (Rhodes & Hart, 2014) memetakan dengan jelas literatur kajian tersebut dalam tema *Party and Electoral Leadership*, khususnya dalam sub-tema *Leaders and Electoral Behavior*. Menurut (Lobo, 2014) kajian para pemimpin menjadi lebih penting sebagai faktor penjelas pilihan dalam pemungutan suara.

Dengan kata lain, kajian pemimpin dan perilaku elektoral memfokuskan pada efek pemimpin terhadap pilihan (*vote choice*). Lebih detail lagi, kajian dari (Lenz, 2013) yang melihat pergeseran suara pemilih dalam pemilu terkait dengan performa kepemimpinan. Tiga faktor yang diasumsikan mempengaruhi peralihan suara (*vote shifting*) pemilih, yaitu (a) peningkatan menonjolnya suatu masalah (*media priming*), (b) perubahan pandangan pemilih tentang masalah kebijakan atau kinerja (*persuasion*), dan (c) peningkatan pengetahuan pemilih tentang posisi kebijakan politisi (pembelajaran). Namun, dalam kasus peralihan suara di Amerika, studi tersebut mengungkap bahwa pembingkaian media dan persuasi berperan mendorong perubahan pilihan ketimbang posisi kebijakan politisi.

Maka, studi ini menekankan pada pentingnya pemimpin (*leaders matter*) dalam menjelaskan peralihan suara dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020. Secara spesifik studi ini menggali pertimbangan pemilih saat memutuskan pilihannya melalui pertanyaan-pertanyaan tentang citra pemimpin di mata pemilih, baik itu kesan individual pemimpin maupun persepsi kinerja kepemimpinannya. Namun, sebagaimana banyak studi tentang pemimpin lainnya, efek pemimpin bervariasi tergantung pada konteks dimana pemimpin itu bekerja (Elgie, 2016). Maka, studi ini berupaya menggali konteks lokal spesifik yang bisa menjelaskan efek kepemimpinan dalam pilkada.

Selain itu, hasil elaborasi (Lobo, 2014) atas kajian efek pemimpin terhadap partai dan perilaku elektoral memaparkan bahwa studi pengaruh pemimpin bagi kualitas proses demokrasi masih jarang dibahas. Pertanyaannya, jika para pemimpin dianggap penting, maka perlu untuk memahami apa yang memberitahu kita tentang proses demokrasi. Apakah semakin pentingnya pemimpin merugikan atau bermanfaat bagi demokrasi? Dalam penelitian ini, pertanyaan mengenai efek pemimpin terhadap demokrasi tidak ditanyakan secara langsung, melainkan berusaha direfleksikan dari penggalian logika peralihan suara dari petahana terhadap penantang. Dengan kata lain, apakah evaluasi terhadap efek petahana oleh pemilih merefleksikan urgensi dan/atau perubahan nilai demokrasi?

Secara spesifik artikel ini menetapkan pernyataan masalah terkait 3 masalah. Pertama, studi ini menggali logika peralihan suara pemilih yang menyebabkan kekalahan petahana dalam pilkada dari sudut pandang pentingnya pemimpin. Selain itu, studi ini menggali konteks di mana pemimpin bekerja untuk mengetahui perbedaan dalam penjelasan peralihan suara. Lalu penjelasan tersebut dikaitkan dengan efek petahana selama masa kepemimpinan periode pertama (2015-2020). Terakhir, masalah yang menjadi perhatian dalam studi ini terkait relevansi hasil eksplorasi logika peralihan suara atas efek petahana dan kondisionalitas konteks lokal kepemimpinan politik terhadap nilai demokrasi yang bekerja.

Berdasarkan temuan penelitian, studi ini memiliki implikasi akademis, pertama, memperluas teori mengenai logika peralihan suara, yaitu sebab kedekatan emosional. Temuan tersebut dapat pula memperluas kajian perilaku memilih, utamanya pendekatan psikologis, dengan memperdalam makna dan konstruksi kedekatan emosional sebagai alasan memilih. Kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih diinterpretasikan sebagai bentuk keterikatan atau loyalitas yang membentuk persepsi pemilih terhadap kandidat (*candidate ID*).

Kedekatan emosional sebagai pertimbangan memilih kandidat penantang menguatkan studi sebelumnya mengenai efek konteks (makro) di mana pemimpin bekerja. Kondisionalitas konteks Kabupaten Blitar yang diwarnai cukup kuat tradisi Islam tradisional (gerakan NU dan tarekat) mengkonstruksi kedekatan emosional tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelusuran terhadap 5 literatur utama yang membahas nilai-nilai (Doorenspleet, 2018; Kelsen, 2013; Sen, 2001; Shapiro et al., 1999; Shorten, 2015), artikel ini mengekstraksinya menjadi enam nilai, yaitu nilai intrinsik, konstruktif, instrumental, kompetitif, partisipatoris, dan deliberatif (penjelasan tiap nilai pada tabel 1).

## Metode Penelitian

Secara ontologis, studi ini termasuk dalam kajian kepemimpinan politik dengan meneliti efek pemimpin terhadap pilihan elektoral. Gains (Hart & Rhodes, 2014) menjelaskan bahwa di antara beragam perspektif analisis dan metodologi dalam studi kepemimpinan politik, analisis observasional (*observational analysis*) merupakan metode paling tepat digunakan dalam studi ini. Selanjutnya, studi ini menggali efek pemimpin tersebut terhadap peralihan suara dari petahana kepada penantang dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020.

(Gains, 2014: 2) mengutip penjelasan Hammersley dan Atkinson (2007) bahwa analisis observasional merupakan bagian dari paradigma interpretif dengan nalar induktif (kualitatif) untuk “mengungkap dunia di sekitar pemimpin yang diobservasi, kepercayaan dan praktiknya”. Analisis observasional memungkinkan peneliti untuk

menyediakan deskripsi yang cukup mengenai fenomena yang diteliti (pemimpin politik, keputusannya, dan efek kepemimpinan terhadap peralihan suara dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020).

Secara operasional, analisis observasional mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan arsip. Wawancara dilakukan kepada para pemilih dan pejabat di 3 desa, KPU dan Bawaslu Kabupaten Blitar, wartawan lokal, akademisi lokal, dan tim sukses pasangan kandidat. Alasan pemilihan para pemilih dan pejabat desa karena keduanya memiliki informasi dan pengalaman tangan pertama (*first hand knowledge and experience*) mengenai alasan pengalihan suara dari kandidat petahana (Pilkada 2015) kepada kandidat penantang (Pilkada 2020). Komisioner KPU dan Bawaslu terpilih secara purposif sebagai informan karena pengetahuan dan pengalaman formalnya menyelenggarakan dan mengawasi Pilkada 2020 beserta dinamika politiknya yang membantu menjelaskan fenomena peralihan suara pada skala makro kabupaten.

Sementara, wartawan lokal dan akademisi lokal terpilih sebagai informan secara purposif karena pengetahuannya dalam mengamati dinamika dan isu politik saat Pilkada 2020 Kabupaten Blitar membantu menjelaskan kondisi makro pendorong peralihan suara. Terakhir, tim sukses pasangan kandidat (petahana) membantu menjelaskan penyebab kegagalan pasangan kandidat petahana, peralihan suara, dinamika politik pilkada, dan isu politik yang menimpa pasangan kandidat petahana. Tim sukses juga menyediakan data-data hasil survei yang membantu menjelaskan kegagalan petahana.

Pemilihan desa ditentukan berdasar tingkat kompetisi elektoral. Pemilihan lokasi berdasarkan kriteria desa sesuai tingkat persaingan antara kandidat petahana dan penantang dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020. Level persaingan diketahui dari perolehan suara sebagaimana diunggah di situs resmi KPU RI (<https://pilkada2020.kpu.go.id>).

Langkah-langkah pemilihan lokasi penelitian (desa terpilih) secara spesifik dijelaskan, pertama, berdasarkan data Hasil Rekapitulasi Pilkada Kabupaten Blitar Tahun 2020, peneliti menentukan kecamatan yang menunjukkan hasil rekapitulasi dengan persaingan perolehan suara paling ketat antara pasangan kandidat Rijanto-Marhaenis (01) dan pasangan Rini Rahmad (02), pasangan 01 menang paling banyak, dan pasangan 02 menang paling banyak. Sebagaimana data rekapitulasi KPU RI, persaingan perolehan suara paling ketat antar pasangan kandidat tersebut terjadi di Kecamatan Doko, petahana menang paling banyak di Kecamatan Bakung, dan penantang menang paling banyak di Kecamatan Udanawu.

Kedua, setelah memilih Kecamatan, selanjutnya dipilih satu desa dengan kriteria yang sama. Hasilnya, peneliti menetapkan Desa Sumberbendo (samaran) Kecamatan Doko terpilih karena menunjukkan persaingan paling ketat antar kedua pasangan kandidat. Sementara Desa Tentrem (samaran) Kecamatan Bakung terpilih karena

petahana mendapat suara paling banyak dan Desa Makmur (samaran) Kecamatan Udanawu dipilih karena penantang memperoleh suara paling banyak.

Ketiga, pemilihan lokasi wawancara dengan para pemilih ditentukan berdasarkan kriteria wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama dengan kriteria pemilihan desa. Wilayah TPS 5 Desa Sumberbendo terpilih sebagai lokasi wawancara karena menunjukkan persaingan paling ketat antar kedua pasangan kandidat. TPS 1 Desa Tentrem dipilih karena petahana mendapat suara paling banyak. TPS 5 Desa Makmur terpilih karena penantang memperoleh suara paling banyak.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari kerja lapangan, penelitian ini menerapkan analisis data induktif yang disebut *Grounded Theory Method* (GTM) (Strauss & Corbin, 1998). Peneliti membaca semua data yang ditranskripsi dan mempraktikkan 3 proses pengkodean, yaitu pengkodean terbuka, pengkodean aksial, dan pengkodean selektif.

### Evaluasi Kandidat Menjelaskan Peralihan Suara

Dinamika politik Kabupaten Blitar menjelang Pilkada 2020 tergolong tidak meriah. Kuatnya citra petahana mendorong figur calon pemimpin dan parpol berhati-hati. Hingga 18 Agustus 2020, wartawan lokal Blitar melaporkan belum banyaknya tokoh yang serius dan mendapat rekomendasi partai politik. Hanya pasangan kandidat petahana Rijanto dan Marhaenis Urip Widodo yang telah mendeklarasikan pencalonan.

Meskipun demikian, sejumlah nama sudah memperkenalkan diri kepada publik melalui poster yang dipasang di pinggir jalan raya. Di antara mereka, yaitu Nico Bagus, seorang pengusaha muda. Kemudian Rini Syarifah (Mak Rini), seorang perempuan pengusaha dan putri tokoh NU dan deklarator PKB Kota Blitar (KH Musa Ismail). Nama lainnya, yaitu Sugik, kader Partai Gerindra dan anggota DPRD Kabupaten Blitar. Terakhir, pasangan Kang Aziz-Risyad, pegiat UMKM dan profesional muda.

Hingga masa pendaftaran calon berakhir, KPU Kabupaten Blitar hanya menerima pendaftaran dua pasangan kandidat, yaitu Rijanto-Marhaenis Urip Widodo (pasangan nomor urut 1). Pasangan ini didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian, pasangan penantang, yaitu Rini Syarifah-Rahmad Santoso (pasangan nomor urut 2) didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebagai hasil akhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar menetapkan pasangan kandidat penantang Rini Syarifah-Rahmad Santoso (Mak Rini-Makde Rachmad) sebagai pemenang Pilkada 2020 pada 15 Desember 2020. Pasangan Rini Syarifah-Rahmad Santoso meraih 365.365 suara (58,84 persen). Sedangkan pasangan kandidat petahana mendapat 255.604 suara (41,16 persen).

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian lapangan, terdapat beberapa isu (kampanye negatif dan/atau kampanye hitam) yang beredar di masyarakat. Isu itu menerpa pasangan kandidat petahana, khususnya mengenai calon wakil bupati petahana. Isu-isu tersebut menimbulkan resistensi etis di masyarakat dan mendorong peralihan suara kepada kandidat penantang.

Pertama, isu Calon Wakil Bupati Marhaenis yang memiliki istri dua. Ada kekhawatiran di masyarakat bila Marhaenis menang akan bertambah istrinya. Kedua, isu disharmonisnya hubungan Riyanto dan Marhaenis. Beredarnya kedua isu tersebut terkonfirmasi oleh tim pemenang kandidat petahana (Wawancara 23 September 2021).

Sebaliknya, isu negatif yang menyangkut pasangan kandidat penantang, yaitu penggunaan strategi politik uang. Dalam wawancara dengan masyarakat dan informan non-masyarakat, studi ini mengungkap nominal imbalan Rp 20.000 dari pihak atau individu yang meminta masyarakat memilih pasangan penantang. Meskipun demikian, Bawaslu Kabupaten Blitar menilai tidak cukup bukti legal mengenai praktik politik uang tersebut.

Untuk menggali logika peralihan suara, wawancara para pemilih dilakukan di tiga desa dengan hasil pilkada yang berbeda. Meskipun demikian, studi ini tidak berupaya membandingkan perbedaan logika para pemilih saat memutuskan pilihannya. Sebaliknya, studi ini mencari konvergensi atau keselarasan logika, baik yang memilih penantang maupun memilih petahana. Melalui konvergensi jawaban tersebut, maka bisa diketahui bukan saja alasan kekalahan petahana, melainkan pula kesimpulan umum perilaku memilih dalam pilkada.

Wawancara di Desa Sumberbendo (samaran) Kecamatan Doko dilakukan di wilayah TPS 5 yang menunjukkan hasil pilkada paling imbang di antara TPS lainnya. Seorang pemilih muda (usia 22 tahun), laki-laki, kerja swasta, dan berpendidikan SMA, menyampaikan alasan kritisnya mengalihkan pilihannya kepada penantang:

“Pemimpin kita itu kerja ya kerja, tapi gak berasa dampaknya ke kita. Selama Pak Riyanto jadi bupati ada perubahan cuman tidak merata, warga sini tidak merasakan pembangunan (infrastruktur) yang dilakukan Pak Riyanto.” (Wawancara pada 26 Agustus 2021)

Pada saat wawancara, informan juga didampingi orang tua dan tetangganya, dua orang laki-laki, pemilih senior (usia 56 dan 60 tahun). Keduanya setuju dengan alasan tersebut.

Pemilih lain, seorang laki-laki pedagang (usia 43 tahun), berpendidikan SMP dan aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dan pembangunan di lingkungannya menambahkan alasan berbeda dengan singkat, “Alasan wakilnya (calon wakil bupati petahana)” (Wawancara pada 26 Agustus 2021). Maksudnya, ia memilih penantang karena tidak setuju dengan calon wakil bupati petahana.

Wawancara lain dengan perempuan pemilih berpendidikan SMA (usia 40 tahun), aktif di lembaga pendidikan usia dini, memperjelas apa yang dimaksud dengan faktor calon wakil bupati.

“Kalau saya sendiri memilih Pak Riyanto, karena beliau itu (mantan) kepala diknas (dinas pendidikan) Kabupaten Blitar. Tapi masyarakat yang merubah haluan dari (disebabkan) wakilnya. Dari catatan wakilnya tidak begitu bagus. Pak Riyanto itu orang bagus, tapi wakilnya ndak.” (Wawancara pada 26 Agustus 2021)

Pendapat senada disampaikan seorang perempuan pejabat desa, ia menambahkan:

“Masyarakat itu seneng kalo sama pak Riyanto, silaturahminya kenceng, kerjanya bagus. Tetapi bermasalah dengan wakilnya, Pak Marhaenis. Saya sebagai orang yang beragama (Islam) ya tidak seneng, sama dengan yang lain.” (Wawancara pada 26 Agustus 2021)

Jawaban ini menambah penjelasan ‘efek negatif’ calon wakil bupati yang mendorong peralihan suara kepada penantang.

Hanya mempertimbangkan kandidat bupati petahana juga disampaikan informan pemilih. Seorang perempuan paruh baya, usia 50 tahunan, pemilik warung kecil menyampaikan alasannya dalam Bahasa Jawa halus:

“Pak Riyanto tetep. Tiyang niki (menunjuk stiker Mak Rini di pintu warung) dereng eruh, dereng sumerap. Nggih, tiyangeniku (Riyanto) nggak onok cirine selama ini. Sae om, Pak Riyanto niku. ...Kulo disukai kresek gambar Mak Rini, tapi panggah milih Pak Riyanto”. (Pak Riyanto tetap, orang ini (menunjuk stiker Mak Rini di pintu warung) belum tahu. Ya, orangnya itu (Riyanto) tidak ada cacatnya (kesalahan) selama ini. Bagus om, Pak Riyanto itu. ...Saya diberi tas kresek gambar Mak Rini, tapi tetap memilih Pak Riyanto).” (Wawancara pada 26 Agustus 2021)

Logika tetap memilih petahana dalam Pilkada tahun 2020 karena menilai petahana sebagai orang baik (*tiyang sae*). Selain itu, wawancara dengan seorang laki-laki pemilih, petani dan aparat desa, berpendidikan SMA, tinggal di RT 02 RW 01 tetap memilih Pak Riyanto. Ia dikenal sebagai figur yang ramah (*blater*), kalau diundang warga hadir, pernah jadi camat. Ia tetap memilih petahana, juga karena penantang orang baru, belum diketahui prestasinya (Wawancara pada 26 Agustus 2021).

Selanjutnya, wawancara di Desa Makmur (samaran) Kecamatan Udanawu dilakukan di wilayah TPS 5 yang menunjukkan hasil pilkada paling banyak dimenangkan oleh penantang dibanding TPS lainnya. Seorang perempuan pemilih, warga RT 03 RW 05, usia 41 tahun, berwirausaha dan berpendidikan SMA (tidak tamat), aktif di PKK, dan tinggal di Desa Makmur sejak lahir menyampaikan alasannya:

“...karena ingin punya suasana baru (perubahan). Zaman Pak Riyanto yang saya rasakan dan kelihatannya keadaannya seperti itu-itu saja, kita ingin yang lebih baik, walaupun kita gak tau Mak Rini ini akan memimpin seperti apa, tapi paling tidak kita punya suasana yang berbeda”<sup>1</sup> (Wawancara pada 3 September 2021).

Selain alasan perubahan, informan juga menyampaikan alasan terkait usia dan prospek kinerja kepemimpinan. Seorang informan laki-laki, berpendidikan SMA, bekerja sebagai peternak unggas dan petani, berusia 50 tahun, dan tinggal di Desa Makmur sejak lahir menuturkan:

“...karena ingin ada perubahan, pak Riyanto kan sudah lama di pemerintahan jadi ingin ada yang baru. Pak Riyanto kan sudah tua, pemikirannya lebih cerdas yang muda. Mak Rini kan belum pernah ada di kancah politik, masih permulaan jadi punya semangat yang tinggi dan punya kreatifitas.” (Wawancara 3 September 2021)

Meskipun sedikit, terdapat pemilih yang tidak mengalihkan dukungannya dari petahana. Seorang perempuan pemilih berusia 37 tahun, berpendidikan SMU, dan menjalankan usaha toko daring produk pakaian tetap mengapresiasi capaian kinerja petahana. Ia menuturkan, “Tetap memilih Pak Riyanto. Dilihat dari perkembangannya baik kok. Bangunan daerahnya, jalan-jalan udah baik, kok. Jadi pak Riyanto patut dipertahankan.” (Wawancara pada 3 September 2021)

Setelah dari Desa Makmur, penelitian dilakukan di Desa Tentrem (samaran) Kecamatan Bakung dan difokuskan di Wilayah TPS 1 (RW 03). Di TPS 1, petahana meraih suara terbanyak. Saat wawancara (9 September 2021) terungkap dan terkonfirmasi oleh semua informan yang diwawancarai bahwa petahana memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan warga desa. Desa Tentrem merupakan lokasi penempatan tugas kali pertama bagi petahana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hubungan antara petahana dan warga desa terjalin baik hingga petahana menjadi Bupati Blitar periode 2015-2020.

Kedekatan hubungan tersebut cukup kuat mewarnai logika keputusan memilih warga dan bisa menjelaskan mengapa Desa Tentrem merupakan lumbung suara terbesar se-Kecamatan Bakung bagi petahana. Seorang laki-laki pemilih berusia 50 tahun, pengurus RW 03, pemilik usaha jasa transportasi, dan tinggal di desa sejak lahir, menuturkan alasannya:

“Kalo misalnya ketemu yang lebih bagus, maka yang dipilih yang lebih bagus. Tidak ada pertimbangan wakil, hanya fokus ke Pak Riyanto. Seumpama timsesnya Mak Rini (datang ke desa), warga di sini tidak masalah, karena kepercayaan warga di sini ke Pak Riyanto sudah cukup tinggi. Kalo di sinikan juga terbuka. Walaupun timsesnya Mak Rini datang tidak ada pengaruh.” (Wawancara pada 9 September 2021)<sup>2</sup>

Selain alasan kedekatan dengan petahana, warga juga memiliki harapan bila petahana kembali terpilih sebagai bupati akan memberikan ‘manfaat’ bagi desa. Informan laki-laki pemilih berusia 63 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir menyampaikan:

“Emang dari dulu Pak Riyanto terkenal di Desa Tentrem. Terkenalnya karena Pak Riyanto aktif organisasi. Kita merasa dekat sama pak Riyanto, karena pak Riyanto berasal dari kita. Kita itu memilih orang terdekat kita, agar lebih mudah melaporkannya jika terdapat masalah... Saya mencoblos karena berharap ada dampak ke Desa Tentrem... Kedekatan dengan pak Riyanto kedekatan pribadi.” (Wawancara 9 September 2021)

Informan lainnya, laki-laki pemilih berusia 60 tahun, pengurus RT 03, bertani, tinggal di Desa Tentrem sejak lahir, dan pegiat seni, menambahkan:

“Selain udah lama tinggal di Tentrem, masyarakat di sini udah percaya dan menaruh harapan besar (petahana) untuk menjadi pemimpin. Karena dengan begitu masyarakat kalopun membutuhkan izin akan lebih dimudahkan terutama pada agenda-agenda hajatan. Selain itu, Pak Riyanto memfasilitasi kesenian-kesenian daerah. Keinginan warga dapat terealisasi kalo pak Riyanto menjadi pemimpin. Kegiatan keseniannya di sini ada *ludruk*, *ketoprak*, dan *jaranan*.” (Wawancara pada 9 September 2021)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, nampak bahwa selain alasan kedekatan emosional antara petahana dan pemilih di TPS 5 Desa Tentrem, alasan warga juga terkait kedekatan akses terhadap petahana seandainya terpilih kembali. Dua poin logika ini menunjukkan pentingnya kedekatan antara kandidat dan pemilih yang bisa mencegah peralihan suara kepada petahana. Kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih menjelaskan tingginya perolehan suara petahana di Desa Tentrem.

Selain menggali informasi informan pemilih, penelitian ini menggali informasi dari informan lainnya yang mengamati, menganalisis, dan bisa membandingkan fakta dan data peralihan suara. Untuk tujuan itu, wawancara dilakukan kepada tim sukses, komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), wartawan, dan akademisi lokal yang mengamati Pilkada Kabupaten Blitar 2020.

Sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada, KPUD dan Bawaslu harus bersikap dan bertindak netral. Namun, dalam konteks penelitian ini, kedua lembaga tersebut tetap bisa menjadi informan penting karena memiliki pengetahuan dan pengalaman tangan pertama (*firsthand knowledge and experience*) mengenai penyelenggaraan pilkada dan dinamikanya. Jawaban yang disampaikan KPUD dan Bawaslu tidak merepresentasikan institusi, melainkan pendapat individu.

Mengenai peralihan suara dari petahana kepada penantang, Komisioner 1 KPUD, menyampaikan refleksinya:

“Sebelumnya juga ada survei mengenai kepuasan publik, dari beberapa lembaga survei terhadap *incumbent* berada di angka 46%. Menurut pengamat dengan angka seperti itu (petahana) bisa dikalahkan.” (Wawancara pada 19 Agustus 2021)<sup>3</sup>

Sementara itu, Komisioner 2 KPU menambahkan eksplanasi lainnya:

“*Background* dari masing-masing, misalnya pengusung ada NU atau Muhammadiyah di PKB dan PAN walaupun secara kultur NU dan Muhammadiyah gak ikut-ikut tetapi *background* (organisasi kemasyarakatan) gak bisa dihilangkan begitu saja. .... Walaupun Blitar basisnya PDIP, tetapi kekuatan NU tidak bisa dinafikan.” (Wawancara pada 9 September 2021)

Berdasarkan penuturan tersebut, maka 2 poin mengonfirmasi jawaban informan pemilih, yaitu rendahnya kinerja petahana di mata pemilih dan kedekatan identitas komunal antara pemilih dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung penantang.

Sementara Komisioner 1 Bawaslu Kabupaten Blitar mengonfirmasi informasi dari informan pemilih mengenai praktik politik uang, meskipun tidak ada dukungan alat bukti yang cukup.

“Kalau berdasarkan laporan ke sini (Bawaslu) ada dugaan politik uang. Tetapi dalam pembuktian tidak cukup alat bukti. Apakah ada kecurangan, perlu digali lagi.” (Wawancara pada 19 Agustus 2021)

Ia juga mengonfirmasi kurang solidnya tim kampanye, utamanya antara calon bupati dan wakil bupati petahana.

“Secara politik perhelatan itu, Calon 01 (petahana) itu yang bekerja hanya calon bupati. Calon wakil bupati kurang bekerja. Selama 71 hari kampanye, hanya cabup yang terjun langsung, cawabup kurang turun.” (Wawancara pada 19 Agustus 2021)

Informan juga mengonfirmasi jawaban pemilih mengenai citra calon wakil bupati yang justru mendorong peralihan suara dari petahana kepada penantang, dengan sebuah analogi, “Bila survei kepuasan selama 5 tahun, faktor wakil, umpama produk itu mau dijual berat.” (Wawancara pada 19 Agustus 2021)

Dua wawancara terakhir dengan tim sukses petahana dan akademisi lokal dari universitas terbesar di Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar mengonfirmasi informan pemilih. Wawancara dengan anggota tim sukses petahana (23 September 2021) mengungkapkan tentang hasil survei yang menunjukkan rendahnya kepuasan masyarakat (di bawah 50 persen) terhadap kinerja pasangan petahana selama memimpin Kabupaten Blitar (2015-2020). Anggota tim juga mengonfirmasi tingkat efektifitas politik uang dalam memengaruhi peralihan suara kepada penantang. Penyelenggaraan Pilkada 2020 berdekatan dengan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Blitar yang mempraktikkan politik transaksional, sehingga situasi transaksional itu efektif mengarahkan suara pemilih dalam Pilkada 2020.

Hasil evaluasi berbasis data survei yang disampaikan anggota tim pemenangan kandidat petahana menambah satu wawasan berbeda, yaitu sikap terlalu percaya diri (*over confident*) pasangan kandidat petahana saat mengarungi Pilkada 2020. Sikap itu justru menutupi berbagai kelemahan pasangan petahana, termasuk kampanye hitam mengenai citra calon wakil bupati yang justru menggerus simpati kepada calon bupati petahana. Anggota tim pemenangan menyampaikan:

“Pada survei kami yang terakhir pemilih Pak Riyanto pun memilih nomer 2, bahkan pemilih yang asal memilih itu masih tinggi ada 5%. (Karena) *Overconfident*-nya (petahana) banyak melupakan kelemahan termasuk wakil bupatinya yang banyak memiliki permasalahan pribadi dan itu menjadi senjata bagi pihak musuh kita.... Dan akhirnya terbukti, 10,5% memilih nomer urut 2 karena tidak suka dengan wakil bupatinya. Hal tersebut tertutupi dengan *overconfidence* tadi.” (Wawancara pada 23 September 2021)

Wawancara ini mengonfirmasi efek negatif citra calon wakil bupati. Selain itu, wawancara ini menjelaskan detail berbagai isu negatif terhadap calon wakil bupati petahana yang berhasil dimanfaatkan oleh kubu penantang untuk menggabungkannya dengan isu negatif kinerja petahana dan isu pentingnya perubahan pemimpin daerah. Pemanfaatan citra negatif tentang calon wakil bupati petahana juga dikonfirmasi akademisi lokal, ia menuturkan “Tim sukses (penantang) memainkan isu (calon wakil bupati petahana) ke ibu-ibu, sehingga mengalihkan suaranya ke Mak Rini.” (Wawancara pada 23 September 2021).

Sementara itu, laporan media tentang kemenangan kandidat penantang dalam Pilkada Kabupaten Blitar 2020 mengonfirmasi informasi wawancara:

“Menurut Munib, selama ini calon yang diusung selalu didiskreditkan bukan warga asli Blitar. Padahal selama dipimpin warga asli Blitar, pembangunan justru tidak merata di wilayah pinggiran. Di sinilah celah yang dimanfaatkan tim sukses PKB untuk mendekati masyarakat akar rumput.”

"Kami hanya membalik isu yang dihembuskan lawan. Kami mendekati mereka tanpa kepentingan kewilayahan. Kami juga memanfaatkan terlalu percaya dirinya *incumbent* sehingga kami masuk ke level paling bawah masyarakat," ungkapanya.

Kutipan wawancara terhadap Ketua Tim Pemenangan Kubu Penantang di media daring detik.com (diakses pada 9 Maret 2021) menjelaskan strategi yang mengonfirmasi pernyataan-pernyataan dari para informan pemilih dan non-pemilih.

### **Kondisionalitas Konteks Lokal Menjelaskan Peralihan Suara**

Mak Rini (Rini Syarifah), Bupati Blitar terpilih dalam Pilkada 2020, menyampaikan pidato sesaat setelah mengklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat pada 9 Desember 2020. Berikut kutipannya:

"Alhamdulillah saya merasa usaha kami tidak sia-sia. Kami ucapkan terima kasih pada tim. Ada pak kyai, ada barikade, ada baret merah juga semua elemen masyarakat yang saya cintai. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Blitar," kata Rini Syarifah di Blitar, Jawa Timur, Rabu (Asmaul Chusna, 2020).

Pernyataan tersebut secara spontan menyebut 3 elemen penting yang berkontribusi pada peralihan suara dari petahana ke penantang. Elemen-elemen kekuatan penantang tersebut menunjukkan urgensi kondisionalitas konteks lokal dalam kepemimpinan yang mendorong peralihan suara.

Mengeksplorasi kondisionalitas konteks lokal berarti studi ini berusaha mengungkap efek pemimpin terhadap pilihan elektoral konstituen. Selain itu, kondisionalitas menyangkut faktor-faktor lokal unik (*indigenous*) Kabupaten Blitar yang menjelaskan konteks efek pemimpin terhadap pilihan elektoral dalam Pilkada 2020. Namun, studi ini tidak hanya terpaku pada kepemimpinan petahana, melainkan pula kondisionalitas prospek kepemimpinan politik penantang.

Selain alasan perubahan, studi ini mengungkap alasan lain yang menonjol dari para informan yang mengalihkan pilihan dari petahana kepada penantang, yaitu karena alasan kedekatan emosional dengan kandidat penantang, suaminya, dan keluarganya. Kedekatan tersebut dikarenakan kesamaan keterlibatan dalam praktik keagamaan Islam, yaitu tarekat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan akademisi lokal, jejaring tarekat (*thoriqoh*) yang berkontribusi pada peralihan suara kepada penantang disebut dengan jelas.

"Salah satunya juga Mak Rini mengandalkan kapital sosial yakni *thoriqoh* (tarekat). Jadi boleh dikatakan peran besar jejaring *thoriqoh*. PKB kurang total (mendukung penantang), lebih kuat *thoriqoh*." (Wawancara pada 23 September 2021)

Beberapa pemberitaan media massa online mengonfirmasi kedekatan antara pasangan penantang dan jejaring Pondok PETA (Pesulukan *Thoriqoh* Agung) Tulungagung. Kandidat bupati penantang dikenal memiliki hubungan keluarga dengan Pondok PETA. Sebuah laporan menyebutkan:

"Meski terlahir sebagai putri salah satu deklator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar, di dunia politik Rini Syarifah merupakan pendatang baru. Perempuan kelahiran 1977 itu sebelumnya lebih banyak berkecimpung sebagai pengusaha buku dan konveksi."

"Begitu juga dengan suaminya yang merupakan kerabat dekat Pondok Pesantren Pesulukan *Thoriqoh* Agung (PETA) yang berpusat di Kabupaten Tulungagung. Sementara pendampingnya, yakni Cawabup Rachmad Santoso berlatar belakang sebagai praktisi hukum. Makde Rachmad yang juga santri Ponpes PETA Tulungagung, merupakan Ketua Umum IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia)." (Arif, 2020).<sup>4</sup>

Meskipun tidak secara eksplisit ditegaskan keterlibatan pondok dalam pemenangan pasangan kandidat penantang, namun sejumlah hasil wawancara mengonfirmasi peran-peran politik elektoral itu. Liputan satu media daring menyebutkan strategi gerakan ‘senyap’ yang dijalankan tim dari Pondok PETA. Secara operasional tim terjun hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) atau satuan terkecil masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui dua tim yaitu Baret Merah (Barisan RT Mak Rini-Makdhe Rahmad) dan Brigade (Barisan Garda Desa) (Redaktur Berita Langit, 2020).

Baret Merah bertugas mendeteksi kondisi masyarakat terkini pada tingkat RT (Rukun Tetangga). Tim ini bergerak tidak secara terbuka atau ‘senyap’ agar bisa mengetahui aspirasi warga. Tim ini bahkan bergerak jauh hingga memasuki kantong-kantong konstituen PDI-P yang merupakan pemilih loyal kandidat petahana. Sementara Tim Brigade bertugas mengkoordinasikan Tim Tingkat RT (Baret Merah) agar selaras dan bisa membuka akses kepada tim pemenangan atau relawan kandidat penantang lokasi-lokasi calon pemilih (Redaktur Berita Langit, 2020).

Kontribusi penting lainnya atas keterlibatan 2 tim itu, yakni, berusaha membangun hubungan antara pemilih dan kandidat penantang, terutama pemilih yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tarekat yang terkait dengan Pondok PETA. Seorang laki-laki pemilih, petani berusia 49 tahun, berpendidikan SD dan tinggal di Desa Makmur sejak lahir menuturkan:

“Itu bukan saya punya alasan. Karena Mak Rini itu, cuma saya ikut-ikut keluarga. Itu kan dulu Kyai Jalil (KH Abdul Jalil). Itu apa, itu ikut kumpulan-kumpulan itu saya, itu seakan-akan orangnya keluarga sendiri. Jadi, mempertimbangkan keluarga *thoriqoh* lah, pak. Tidak mengajak sebetulnya sana, cuman iki yoh *anjurane pomo wong* Kyai ne anak Kyai *dhewe*”.

“Memang saya ikut *Thoriqoh* Tulungagung (PETA)”.

“Tapi Kalau memang (Mak Rini) menang di Makmur itu, memang kalau aku pikir wajar. Pasale sih 75 persen itu (Warga Desa Makmur) *thoriqoh* itu, Shadhilyah itu.”<sup>5</sup> (Wawancara pada 3 September 2021)

Alasan serupa terkait kedekatan dengan penantang karena keikutsertaan dalam kegiatan tarekat (pondok) disampaikan seorang perempuan pemilih, ibu rumah tangga berusia 40 tahun, berpendidikan SMP dan tinggal di Desa Makmur sejak 2003. Selain itu, perempuan yang aktif di Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) ini mengetahui kandidat penantang memiliki kedekatan karena sama-sama aktif di Muslimat NU. Ia menuturkan, “Karena Mak Rini itu kan NU, karena kita kan merupakan bagian NU, Muslimat.” (Wawancara 3 September 2021).

Untuk memperkuat argumen kedekatan antara pemilih (sebagai jamaah tarekat) dan kandidat penantang yang didukung dan memiliki hubungan keluarga langsung dengan pemimpin tarekat, seorang laki-laki pemilih yang juga salah seorang Pejabat Desa Makmur menganalogikan keputusan memilih warganya kepada penantang karena hubungan murid dan guru.

“Terkait dengan nurani (pilihan), karena seperti yang saya katakan santri dengan kyai, murid dengan guru. Karena itu istilahnya sebagian para kyai itu mendukung calon, membuat calon seperti itu, akhirnya seperti apa itu, itik digiring yang punya, ya seperti itu (pilihan murid mengikuti pilihan guru) .... Alasan mengalihkan (suara) itu seperti yang saya sampaikan tadi, karena (hubungan) murid dengan guru.” (Wawancara 3 September 2021).

Sebaliknya, informan di Desa Tentrem menyampaikan penjelasan yang sama tentang keputusan tetap memilih petahana. Saat wawancara (9 September 2021) terungkap dan terkonfirmasi oleh semua informan yang diwawancarai bahwa petahana memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan warga desa. Desa Tentrem merupakan lokasi penempatan tugas kali pertama bagi petahana sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hubungan baik antara petahana dan warga desa terjalin hingga petahana menjadi Bupati Blitar periode 2015-2020.

Kedekatan antara petahana dan warga cukup kuat mewarnai logika keputusan memilih. Nalar ini bisa menjelaskan mengapa Desa Tentrem merupakan lumbung suara terbesar se-Kabupaten Blitar bagi petahana. Seorang laki-laki pemilih berusia 50 tahun, pengurus RW 03, pemilik usaha jasa transportasi, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir, menuturkan alasannya:

“Kalo misalnya ketemu yang lebih bagus, maka yang dipilih yang lebih bagus. Tidak ada pertimbangan wakil, hanya fokus ke Pak Riyanto. Seumpama timsesnya Mak Rini (datang ke desa), warga di sini tidak masalah, karena kepercayaan warga di sini ke Pak Riyanto sudah cukup tinggi. Kalo di sinikan juga terbuka. Walaupun timsesnya Mak Rini datang tidak ada pengaruh.” (Wawancara 9 September 2021).<sup>6</sup>

Selain alasan kedekatan dengan petahana, warga juga memiliki harapan bila petahana kembali terpilih sebagai bupati akan memberikan ‘manfaat’ bagi desa. Informan laki-laki pemilih berusia 63 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir menyampaikan:

“Emang dari dulu Pak Riyanto terkenal di Desa Tentrem. Terkenalnya karena Pak Riyanto aktif organisasi. Kita merasa dekat sama Pak Riyanto, karena Pak Riyanto berasal dari kita. Kita itu memilih orang terdekat kita, agar lebih mudah melapornya jika terdapat masalah”. (Wawancara 9 September 2021)

Informan lainnya, laki-laki pemilih berusia 60 tahun, pengurus RT 03 RW 03, bertani, pegiat seni, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir menambahkan:

“Selain udah lama tinggal di Tentrem, masyarakat di sini udah percaya dan menaruh harapan besar (petahana) untuk menjadi pemimpin. Karena dengan begitu masyarakat kalopun membutuhkan izin akan lebih dimudahkan terutama pada kegiatan hajatan. Selain itu, Pak Riyanto memfasilitasi kesenian-kesenian daerah. Kegiatan keseniannya di sini ada *ludruk*, *ketoprak*, dan *jaranan*.” (Wawancara pada 9 September 2021)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, nampak bahwa selain alasan kedekatan emosional antara petahana dan pemilih di TPS 5 Desa Tentrem, alasan warga juga terkait secara rasional karena 'kedekatan akses' terhadap petahana seandainya terpilih kembali. Dua poin logika ini menunjukkan pentingnya kedekatan antara kandidat dan pemilih yang bisa mencegah peralihan suara kepada petahana. Kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih menjelaskan tingginya perolehan suara petahana di Desa Tentrem.

Temuan-temuan tersebut menjelaskan kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat penantang yang mendorong peralihan suara dari penantang kepada petahana atau tetap memilih kandidat petahana. Kedekatan emosional menjelaskan peralihan suara dibangun melalui 2 aspek, yaitu kesamaan keikutsertaan pemilih pada kegiatan dan jejaring tarekat yang secara langsung memiliki hubungan keluarga guru-murid dengan pasangan kandidat penantang. Aspek lainnya, yaitu kesamaan identitas komunal antara pemilih dan organisasi kemasyarakatan yang mendukung kandidat penantang, yaitu NU.<sup>7</sup> Selain itu, kedekatan emosional pribadi antara petahana dan para konstituen mampu menjelaskan keputusan konstituen untuk tetap memilih petahana, terutama temuan di Desa Tentrem.

## Refleksi Nilai Demokrasi atas Peralihan Suara

Tabel 1 menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang dihimpun dan mewakili sejumlah pustaka rujukan yang relevan.

Tabel 1 Nilai-Nilai Demokrasi

Nilai demokrasi	Penjelasan
Intrinsik	Kepentingan intrinsik (hakiki) dari partisipasi politik dan kebebasan dalam kehidupan manusia
Instrumental	Kepentingan instrumental dari insentif politik dalam menjaga pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel
Konstruktif	Peran konstruktif demokrasi dalam pembentukan nilai dan pemahaman akan kebutuhan, hak, dan kewajiban
Kompetitif	Menghormati kesetaraan (formal), mempromosikan stabilitas dan efisiensi; berpotensi responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga negara; memelihara disposisi berbudi luhur diantara warganegara (misalnya individualitas)
Partisipatif	Menghargai kesetaraan (formal dan substantif); menghormati kebebasan (positif); memelihara disposisi yang baik (misalnya kesopanan) dan keterampilan (misalnya penalaran kritis) di antara warganegara
Deliberatif	Menghargai kesetaraan (formal dan substantif); mencapai legitimasi; mendorong pemerintahan yang baik; memelihara disposisi yang baik (misalnya kesopanan) dan keterampilan (misalnya penalaran kritis) diantara warganegara

Sumber: (Doorenspleet, 2018; Kelsen, 2013; Sen, 2001; Shapiro et al., 1999; Shorten, 2015).

Selanjutnya, tabel 2 menunjukkan hasil perbandingan antara logika peralihan suara dan ketetapan memilih petahana dan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan logika-logika keputusan para pemilih tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai-nilai demokrasi.

Tabel 2 Logika Memilih dan Nilai Demokrasi

Peralihan ke Penantang, karena...	Tetap Memilih Petahana, karena...	Nilai Demokrasi Terwakili
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi (kinerja) kandidat petahana: perlu perubahan, survei kepuasan rendah; petahana sudah tua (penantang lebih muda)</li> <li>2. Alasan 'etis' calon wakil bupati</li> <li>3. Kedekatan emosional: dengan keluarga penantang dan kesamaan aktifitas sosial-kegamaan (Ormas Islam)</li> <li>4. Insentif uang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kandidat: kinerja petahana (<i>tangibility</i>); sikap baik terhadap rakyat (<i>sae</i> dan <i>blater</i>)</li> <li>2. Kedekatan emosional dan kemudahan akses</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intrinsik (partisipasi politik dan kebebasan)</li> <li>2. Instrumental (pemerintah yang akuntabel)</li> <li>3. Kompetitif (responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga)</li> <li>4. Partisipatif (pertimbangan etis dan penalaran kritis)</li> <li>5. Deliberatif (penalaran kritis, disposisi yang baik, legitimasi, dan pemerintahan yang baik)</li> </ol>

Sumber: Logika memilih berasal dari informasi hasil penelitian, diolah. Nilai demokrasi merujuk pada (Sen, 2001; Shorten, 2015).

Alasan peralihan suara kepada kandidat penantang dan keputusan tetap memilih petahana dalam tabel 2 menunjukkan terpenuhinya nilai-nilai demokrasi. Pertama, nilai intrinsik. Alasan-alasan dan narasi yang disampaikan para pemilih untuk mengalihkan keputusan memilih kepada kandidat penantang menunjukkan nilai partisipasi politik dan kebebasan. Pemilih menggunakan haknya untuk menentukan kepemimpinan Kabupaten Blitar 2020-2024 dengan bebas sesuai aspirasi. Logika-logika peralihan suara dan keputusan tetap memilih petahana, terutama isu kinerja kepemimpinan petahana, menunjukkan kapasitas partisipasi politik warga untuk menentukan kebijakan strategis kepemimpinan daerah.

Kedua, nilai instrumental, yaitu terkait nilai demokrasi dalam membentuk pemerintah yang akuntabel. Logika peralihan suara kepada kandidat penantang, salah satunya, karena praktik evaluasi kandidat yang dilakukan para pemilih. Evaluasi para pemilih terhadap kepuasan kinerja kandidat petahana yang rendah menunjukkan pentingnya pemerintah yang akuntabel sebagai manfaat (*outcome*) demokrasi. Manfaat tersebut tidak sepenuhnya memuaskan publik sehingga menimbulkan keinginan perubahan.

Ketiga, nilai kompetitif, yaitu terkait responsivitas pemimpin daerah terpilih terhadap kebutuhan dan kepentingan warga. Logika peralihan suara kepada kandidat

penantang menunjukkan evaluasi pemilih terhadap kandidat petahana. Keinginan perubahan kepemimpinan, rendahnya kepuasan, dan pertimbangan usia kandidat petahana merespon perubahan menjadi dasar keputusan memilih. Di Wilayah Barat Kabupaten Blitar, warga pemilih selama ini menilai ketidakadilan pembangunan. Demokrasi memenuhi nilai esensinya tatkala rakyat mampu menilai capaian kinerja kepemimpinan politik atas pemenuhan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Keempat, nilai partisipatif yang relevan, yaitu pertimbangan etis dan penalaran kritis. Logika peralihan suara dari kandidat petahana kepada kandidat penantang salah satunya karena beredarnya berita-berita persoalan 'etis' yang dihadapi calon wakil bupati petahana. Terlepas dari isu-isu etis tersebut merupakan bagian dari kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam, namun tidak teridentifikasi upaya-upaya kandidat wakil bupati petahana untuk meluruskan berita-berita tersebut. Maka, para pemilih mengalihkan suaranya kepada kandidat penantang karena alasan ketidaksetujuan dengan persoalan etis tersebut.

Selain itu, nilai partisipatif penalaran kritis dalam logika peralihan suara kepada kandidat penantang nampak pada kemampuan evaluasi kandidat yang dilakukan para pemilih. Keputusan peralihan suara diarahkan oleh penilaian kritis terhadap kinerja kandidat petahana dalam kurun 2015-2020. Selain itu, para pemilih yang tetap memutuskan memilih kandidat petahana pun memiliki nalar evaluatif.

Kelima, nilai deliberatif, yaitu penalaran kritis, disposisi yang baik, legitimasi, dan pemerintahan yang baik. Argumen kebajikan (etis) dan penalaran kritis sudah nampak dalam nilai partisipatif. Raihan suara hingga 56 persen pasangan penantang dalam Pilkada 2020 Kabupaten Blitar menunjukkan legitimasi yang kuat. Selain itu, evaluasi kandidat sebagai salah satu dasar utama mengalihkan suara kepada kandidat penantang karena penilaian kepuasan kinerja menunjukkan evaluasi integritas pemerintahan daerah selama dipimpin pasangan petahana. Pun, isu-isu persoalan 'etis' menyangkut wakil bupati petahana menunjukkan pula persoalan sisi integritas pemerintahan lainnya.

Kesulitan muncul saat adanya praktik pemberian uang (politik uang) untuk memobilisasi pilihan. Pengakuan warga saat wawancara dan pemberitaan media<sup>8</sup> menyebutkan adanya praktik politik uang untuk memengaruhi keputusan memilih. Praktik mobilisasi pilihan melalui pemberian uang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sebaliknya, praktik mobilisasi pemilih oleh uang justru mereduksi nilai-nilai demokrasi instrumental, konstruktif, kompetitif, partisipatif dan deliberatif. Pilihan karena imbalan jangka pendek menegasi nilai partisipasi politik dan kebebasan, penalaran kritis, disposisi yang baik atau pertimbangan etis, dan legitimasi dalam demokrasi.

Perbandingan antara temuan penelitian dan riset-riset efek pemimpin terhadap pilihan dalam pemilu terangkum dalam tabel 3. Temuan studi ini menguatkan banyak studi-studi sebelumnya yang relevan. Namun, terdapat pula temuan yang memperluas hasil-hasil studi sebelumnya.

Tabel 3 Efek Politik Elektoral Pemimpin dan Temuan Penelitian

Aspek	Studi Sebelumnya tentang Efek Pemimpin terhadap Suara ( <i>Vote Choice</i> )	Temuan Studi
Luasan Studi (Lobo, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja dan persepsi terhadap petahana (Wattenberg, 1991)</li> <li>• Persepsi publik terhadap para pemimpin (Mc. Allister, 2009)</li> <li>• Evaluasi kandidat atau pemimpin parpol (Dalton, 2002; Curtice &amp; Holmberg, 2005)</li> <li>• Karakter kandidat (Lewis-Beck et.al, 2008; Bittner, 2011)</li> <li>• Keberhasilan parpol (Bittner, 2011).</li> <li>• Kualitas personal pemimpin (Indonesia) (Mujani et al., 2019).</li> </ul>	<p>Peralihan suara ke penantang, karena...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi (kinerja) kandidat petahana: perlu perubahan, survei kepuasan rendah; petahana sudah tua (penantang lebih muda)</li> <li>2. Alasan 'etis' calon wakil bupati</li> <li>3. Kedekatan emosional: dengan keluarga penantang dan kesamaan aktifitas sosial-kegamaan (Ormas Islam)</li> <li>4. Insentif uang</li> </ol> <p>Tetap memilih petahana, karena...</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kandidat: kinerja petahana (<i>tangibility</i>); sikap baik terhadap rakyat (<i>sae</i> dan <i>blater</i>)</li> <li>2. Kedekatan emosional dan kemudahan akses</li> </ol>
Konteks (Lobo, 2014)	Mikro	<p>Variabel independen di luar diri pemilih:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simpati terhadap pemimpin (Kroh, 2004; Bittner, 2011),</li> <li>• Keterampilan atau pengetahuan politik terhadap pemimpin (Clarck et al., 2009)</li> <li>• Ekspose media terhadap pemimpin (Mughan, 2000; Kroh, 2004; Cutrice &amp; Hujnan, 2007)</li> <li>• Pengetahuan terhadap lanskap politik atau isu persaingan atau tensi politik (Kroh, 2004; Bittner, 2011).</li> <li>• Lenz (2013) Peralihan suara karena (a) menonjolnya suatu masalah (media priming), (b) mengubah pandangan pemilih tentang masalah kebijakan atau kinerja (<i>persuasion</i>), atau (c) meningkatkan pengetahuan pemilih tentang posisi kebijakan politisi (<i>learning</i>).</li> </ul>
	Makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem presidensial atau semi-presidensial mendorong kuatnya efek pemimpin terhadap pilihan pemilih (Curtice dan Holmberg 2005; Curtice dan Hunjan 2007)</li> <li>• Jenis partai yang eksis, yaitu penampung semua versus pemilih (<i>catch-all versus electoralist</i>) (Costa Lobo, 2008)</li> <li>• Konteks di mana pemimpin bekerja (Elgie, 2016)</li> <li>• Pemimpin populer/disukai (Aarts and Blais, 2011 in Elgie, 2015)</li> </ul>

Sumber: (Elgie, 2016; Lenz, 2013; Lobo, 2014; Mujani et al., 2019). Kolom 3 berasal dari temuan penelitian (2021).

Studi ini mengoreksi penggunaan istilah 'media' dalam temuan (Lenz, 2013). Pengertian media sebaiknya didefinisikan dengan cair atau tidak ketat, tidak harus terkait dengan media pemberitaan umum (formal), baik cetak maupun elektronik. Penekanan temuan (Lenz, 2013) sebaiknya dipahami pada substansi priming atau penonjolan suatu isu yang kemudian membingkai makna pada objek kampanye. Dalam temuan studi ini, penonjolan isu yang relatif berhasil mendorong peralihan suara kepada kandidat penantang, yaitu permasalahan 'etis' calon wakil bupati petahana yang membentuk persepsi negatif dalam benak para pemilih. Studi ini memperkuat kontribusi bias informasi sebagaimana disampaikan (Trounstone, 2009), meskipun dalam situasi yang berbeda. Strategi bias informasi justru merugikan petahana dan menguntungkan penantang.

Studi ini tidak mengonfirmasi temuan studi (Lenz, 2013) mengenai faktor peralihan suara (ketiga) akibat meningkatnya pengetahuan pemilih tentang posisi kebijakan politisi (*learning*). Studi ini tidak menemukan argumen yang cukup dari para pemilih mengenai posisi kebijakan, baik kandidat petahana maupun kandidat penantang, yang menjadi logika peralihan suara.

Sebaliknya, studi ini memperluas studi (Lenz, 2013), yaitu alasan kedekatan emosional sebagai logika peralihan suara kepada kandidat penantang. Para konstituen merasa memiliki kedekatan dengan penantang dalam keikutsertaan aktifitas tarekat. Para pemilih mengetahui bahwa suami kandidat penantang memiliki hubungan kekerabatan dengan pengasuh Pondok PETA Tulungagung dan mengikuti kegiatan-kegiatan tarekat oleh jejaring pondok itu di Kabupaten Blitar. Para pemilih yang mengikuti kegiatan tarekat merasa memiliki kedekatan emosional karena hubungan tersebut, atau seperti hubungan guru-murid. Konstruksi sosial kedekatan emosional ini mendorong para pemilih untuk mengalihkan suaranya kepada kandidat penantang.

Pertimbangan kedekatan emosional juga muncul dalam bentuk kesamaan identitas organisasi antara kandidat penantang dan pemilih, yaitu kesamaan identitas Ormas NU. Sebagaimana ditemukan dalam wawancara dan pemberitaan media, kandidat bupati penantang memiliki latar belakang keluarga yang aktif di NU. Bahkan ayah kandidat bupati penantang tercatat sebagai salah seorang deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar. PKB merupakan partai politik yang didirikan dan menjadi representasi politik warga NU (Nahdliyin). Tokoh NU Kabupaten Blitar menyebut kandidat bupati penantang sebagai Kader NU. Kesamaan identitas di antara pemilih itu terutama didorong oleh dukungan secara terbuka Muslimat NU dan Fatayat NU kepada pasangan kandidat petahana.<sup>9</sup>

Dalam kajian perilaku memilih, kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih merupakan bentuk keterikatan (*attachment*) atau loyalitas yang membentuk persepsi pemilih, seperti halnya keterikatan kepada partai politik (*party identification*). Temuan logika peralihan suara ini bisa memperluas kajian dalam pendekatan

psikologis perilaku memilih dengan memperdalam makna dan konstruksi kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat sebagai alasan memilih.

Dalam kajian efek pemimpin terhadap pilihan para pemilih dalam pemilu, temuan kedekatan emosional sebagai pertimbangan memilih kandidat penantang dalam studi ini menguatkan studi (Elgie, 2016) tentang efek konteks (makro) di mana pemimpin bekerja. Kondisionalitas konteks lokal Kabupaten Blitar yang mendapat pengaruh tradisi Islam tradisional (gerakan NU dan tarekat) bisa menjelaskan logika peralihan suara kepada penantang. Kedekatan emosional dengan kandidat penantang karena atribut identitas (nahdliyin dan keluarga penggerak tarekat) yang menyertai kandidat bupati penantang.

Sementara itu, identitas kandidat wakil bupati penantang yang dicalonkan PAN mendorong kedekatan emosional dengan pemilih berlatar belakang Ormas Muhammadiyah. Studi menemukan, di desa-desa dengan pemilih komunitas Muhammadiyah, kandidat penantang memperoleh raihan suara yang lebih banyak.

Bagi kajian nilai demokrasi, makna kedekatan emosional sebagai dasar pertimbangan peralihan suara tampaknya kurang berarti daripada penjelasan-penjelasan rasional, seperti evaluasi kandidat. Temuan studi ini berpotensi mengembangkan nilai demokrasi yang berbeda apabila nilai demokrasi juga mencakup manfaat yang tidak selamanya nampak rasional, atau mencakup realitas *rational irrationality*. (Caplan, 2011) berpendapat bahwa “irrasionalitas rasional lebih mungkin terjadi dalam situasi di mana orang memiliki preferensi atas keyakinan, yaitu, beberapa jenis keyakinan lebih menarik daripada yang lain dan biaya marjinal untuk individu memegang keyakinan yang salah (atau irasional) rendah”.

Dalam kaitan nilai demokrasi, maka demokrasi sebaiknya juga dipandang sebagai ruang ekspresi kedekatan emosional antara warga dan pemimpin, tidak semata penilaian kepada pemimpin. Aspirasi politik tak selalu berkonsekuensi pada janji materi seorang pemimpin kepada warganya, melainkan mencakup pula pemenuhan sisi emosional.

Temuan tersebut menjelaskan pula pentingnya pertimbangan konteks dalam menjelaskan bekerjanya demokrasi (*context dependent*). Penjelasan ini relevan sebagai argumen pembanding atas teori demokrasi liberal yang nampak memaksakan ukuran bekerjanya demokrasi, utamanya demokrasi liberal.

## Penutup

Berdasarkan temuan studi ini, kekalahan kandidat petahana terjadi karena peralihan suara kepada kandidat penantang. Logika peralihan suara didasari alasan evaluasi pasangan kandidat petahana karena rendahnya kepuasan warga terhadap kinerja kepemimpinan 2015-2020. Rendahnya kepuasan tersebut berujung pada menguatnya isu perubahan dan diterima oleh pemilih hingga mengalihkan suaranya kepada kandidat penantang. Evaluasi juga dilakukan, secara spesifik, terhadap kandidat wakil bupati yang dinilai memiliki persoalan etis berdasarkan sejumlah isu yang berkembang dan dipersepsi negatif oleh warga hingga memutuskan untuk

mengalihkan pilihan kepada kandidat penantang. Selain itu, kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat penantang merupakan faktor kondisionalitas konteks lokal dalam kepemimpinan yang menjelaskan peralihan suara pemilih.

Penjelasan logika peralihan suara kepada kandidat penantang merefleksikan pentingnya nilai demokrasi dalam penyelenggaraan pilkada, yaitu pemenuhan nilai-nilai intrinsik (partisipasi politik dan kebebasan), instrumental (pemerintah yang akuntabel), kompetitif (responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan warga), partisipatif (pertimbangan etis dan penalaran kritis), dan deliberatif (penalaran kritis, disposisi yang baik, legitimasi, dan pemerintahan yang baik).

Temuan-temuan studi ini memiliki implikasi akademis, pertama, memperluas studi (Lenz, 2013) mengenai logika peralihan suara, yaitu karena kedekatan emosional dengan kandidat penantang. Temuan tersebut bisa pula memperluas kajian perilaku memilih, utamanya pendekatan psikologis dengan memperdalam makna dan konstruksi kedekatan emosional sebagai alasan memilih. Kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih bisa diinterpretasikan sebagai bentuk keterikatan atau loyalitas yang membentuk persepsi pemilih (*candidate ID*).

Khusus kajian efek pemimpin terhadap pilihan, kedekatan emosional sebagai pertimbangan memilih kandidat penantang menguatkan studi (Elgie, 2016) tentang efek konteks (makro) di mana pemimpin bekerja. Kondisionalitas konteks lokal Kabupaten Blitar yang diwarnai cukup kuat tradisi Islam tradisional (gerakan NU dan tarekat) mengkonstruksi kedekatan emosional.

Penjelasan kedekatan emosional sebagai dasar pertimbangan peralihan suara, meskipun nampak kurang berarti dibanding penjelasan rasional seperti evaluasi kandidat, berpotensi mengembangkan nilai demokrasi yang berbeda. Mulai sekarang, nilai demokrasi juga perlu mempertimbangkan manfaat non-rasional, atau mencakup realitas *rational irrationality* (Caplan, 2011). Temuan itu menunjukkan pula pentingnya pertimbangan konteks dalam menjelaskan bekerjanya demokrasi (*context dependent*). Penelitian lebih lanjut mengenai manfaat non-rasional sebagai nilai demokrasi layak untuk direkomendasikan sebagai pekerjaan rumah riset tentang nilai demokrasi.

## Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh informan pemilih, tiga kepala desa di lokasi penelitian, KPUD dan Bawaslu Kabupaten Blitar, para jurnalis, dan akademisi yang menyambut baik pelaksanaan studi ini. Para *reviewers* di BPPM FISIP UB yang memberikan masukan terhadap rancangan studi ini.

## Pendanaan

Penulisan artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang didanai Hibah Penelitian Doktor Lektor Kepala FISIP Universitas Brawijaya Tahun 2021 dengan kontrak penelitian DPP/SPP dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya Nomor: 98/UN10.F11/PN2/2021.

## Daftar Pustaka

- Sindonews. (2020). *Bukti Lemah, Laporan Dugaan Politik Uang di Pilkada Blitar Dikembalikan*. <https://daerah.sindonews.com/read/264976/704/bukti-lemah-laporan-dugaan-politik-uang-di-pilkada-blitar-dikembalikan-1607685174>
- Antaranews. (2020). *Rini-Rahmad klaim menang atas petahana di Pilkada Kabupaten Blitar*. <https://pon.antaranews.com/berita/1886992/rini-rahmad-klaim-menang-atas-petahana-di-pilkada-kabupaten-blitar>
- Caplan, B. (2011). In *The Myth of the Rational Voter*. Princeton University Press.
- Costa Lobo, M. (2008). Parties and Leader Effects: Impact of Leaders in the Vote for Different Types of Parties. *Party Politics*, 14(3), 281–298.
- de Mesquita, B. B., Smith, A., Siverson, R. M., & Morrow, J. D. (2005). *The Logic of Political Survival*. MIT Press.
- Doorenspleet, R. (2018). *Rethinking the Value of Democracy: A Comparative Perspective*. Springer.
- Mediablitar. (2020). *Pilkada 2020 Semakin Dekat, Bawaslu Temukan Kasus Dugaan Politik Uang dan Pelanggaran Lainnya*. <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-321066204/pilkada-2020-semakin-dekat-bawaslu-temukan-kasus-dugaan-politik-uang-dan-pelanggaran-lainnya>
- Elcock, H. (2001). *Political Leadership*. E. Elgar Pub.
- Elgie, R. (2016). *Studying Political Leadership: Foundations and Contending Accounts*. Springer.
- Gains, F. (2014). Observational Analysis. *The Oxford Handbook of Political Leadership*, 281.
- Hart, P., & Rhodes, R. A. W. (2014). *Puzzles of Political Leadership*.
- Faktualnews. (2020). *Bawaslu Blitar Selidiki Video Politik Uang di Blitar*. <https://faktualnews.co/2020/12/07/bawaslu-blitar-selidiki-video-politik-uang-di-blitar/246121/>
- Harianbhirawa. (2020). *Rijanto-Marhaenis Siap Bertarung dengan Rini-Santoso di Pilkada Blitar*. <https://www.harianbhirawa.co.id/rijanto-marhaenis-siap-bertarung-dengan-rini-santoso-di-pilkada-blitar/>
- Duta.co. (2020). *Jual Beli Suara di Pilkada Bupati Blitar, Banyak Money Politik Terjadi*. <https://duta.co/jual-beli-suara-di-pilkada-bupati-blitar-banyak-money-politik-terjadi>
- Kelsen, H. (2013). *The Essence and Value of Democracy*. Rowman & Littlefield.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Hitung Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Kecamatan Talun Pilkada2020*. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/350514>
- Lenz, G. S. (2013). *Follow the Leader?: How Voters Respond to Politicians' Policies and Performance*. University of Chicago Press.
- Lobo, M. C. (2014). Party and Electoral Leadership. *The Oxford Handbook of Political Leadership*, 362–376.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Prasojo, T. A. P. T. A. (2016). *Pilkada dari Perspektif Incumbent (Studi Analisis Pilkada Kabupaten Batang Periode 2017-2022)*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(2), 79–90.
- Beritalangit. (2020). *Bergelombang, Fatayat Dukung Mak Rini-Makdhe Rahmat di Pilbup Blitar*. <https://beritalangit.net/bergelombang-fatayat-blitar-dukung-mak-rini-makdhe-rahmat/>

- Redaktur Berita Langit. (2020, December 3). Menguat, Barisan Muslimat Dukung Mak Rini-Makdhe Rahmat. <https://beritalangit.net/menguat-barisan-muslimat-dukung-mak-rini-makdhe-rahmat/>
- Rhodes, R. A. W., & Hart, P. (2014). *The Oxford Handbook of Political Leadership*. Oxford University Press.
- Jatimtimes. (2020). *Pelaku Politik Uang di Kabupaten Blitar Tertangkap di Dua Kecamatan*. <https://jatimtimes.com/baca/230611/20201207/163100/pelaku-politik-uang-di-kabupaten-blitar-tertangkap-di-dua-kecamatan>
- Sen, A. (2001). *La Democracia Como Valor Universal*. Istor: Revista de Historia Internacional, Año I, Número 4, Primavera de 2001, Pp 10-28.
- Shapiro, I., Hacker-Cordón, C., & Hardin, R. (1999). *Democracy's Edges*. Cambridge University Press.
- Timesindonesia. (2020). *Tim pemenangan Paslon No Urut 1 akan Laporkan Temuan Politik Uang di Pilbup Blitar*. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/314369/tim-pemenangan-paslon-no-urut-1-akan-laporkan-temuan-politik-uang-di-pilbup-blitar>
- Shorten, A. (2015). *Contemporary Political Theory*. Macmillan Education UK. <https://books.google.co.id/books?id=aHyJrgEACAAJ>
- Sobari, W. (2017a). *Blater, from Affinity to Tyranny? The Phenomenon of Sole Candidate in the 2015 Local Election in Blitar Regency, Indonesia*. Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPPS 2017), 167–172.
- Sobari, W. (2017b). *Patronage Driven Democracy: Emerging Local Politics in the Post-Soeharto Indonesia*. Airlangga University Press.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of Qualitative Research Techniques*.
- Sulistiyanto, P., & Erb, M. (2009). *Indonesia and the Quest for "Democracy." Deepening Democracy in Indonesia*, 1–37.
- Trounstone, J. (2009). *Political Monopolies in American Cities: The Rise and Fall of Bosses and Reformers*. University of Chicago Press.

## Tentang Penulis

Wawan Sobari merupakan *Associate Professor* bidang Politik Kreatif, Universitas Brawijaya. Fokus pengajaran dan penelitiannya meliputi kajian *creative politics*, *political entrepreneurship*, inovasi kebijakan, *governance* dan demokrasi, kepemimpinan politik, dan perilaku politik.

---

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup> Pernyataan relatif sama terkait alasan keinginan perubahan atau perbaikan keadaan disampaikan informan pemilih lainnya di wilayah TPS 5, yaitu seorang laki-laki petani berusia 50 tahun, berpendidikan SD dan tinggal di Desa Makmur sejak lahir, warga RT 03 RW 05 dan seorang laki-laki pengurus RW, buruh tani dan berdagang, berusia 56 tahun, berpendidikan SD dan tinggal di Desa Makmur sudah 30 tahun. Kedua informan diwawancarai pada 3 September 2021.

<sup>2</sup> Penjelasan yang senada disampaikan informan lain, yaitu laki-laki pemilih berusia 60 tahun, pengurus RT 03, bertani, tinggal di Desa Tentrem sejak lahir, dan penggiat seni di Desa Tentrem (wawancara 9 September 2021); laki-laki pemilih berusia 63 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir. Informan ini bahkan menyebutkan bahwa selama petahana menjabat bupati (2015-2020) mengunjungi Desa Tentrem 10 kali (wawancara 9 September 2021); laki-laki pemilih berusia 58 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir (wawancara 9 September 2021).

<sup>3</sup> Meskipun tidak disampaikan oleh para pemilih secara eksplisit, tidak bekerjanya mesin politik parpol pendukung utama petahana (PDIP) disampaikan pula oleh jurnalis 1 dari media dalam jaringan (online) yang banyak meliput Pilkada Kabupaten Blitar 2020. Sebaliknya, ia mengonfirmasi bekerjanya mesin politik penantang hingga ke tingkat pemilih di desa. Selain itu, sang jurnalis juga menangkap isu tentang perubahan kepemimpinan 5 tahun ke depan untuk kemajuan Kabupaten Blitar (Wawancara pada 30 September 2021).

<sup>4</sup> Pemberitaan lain melaporkan keterlibatan politik Pemimpin Pondok PETA yang memerintahkan Rahmad Santoso menjadi Calon Wakil Bupati penantang. Rahmad juga merupakan santri Pondok <https://www.harianbhira.com/rijanto-marhaenis-siap-bertarung-dengan-rini-santoso-di-pilkada-blitar/> diakses pada 5 Desember 2021.

<sup>5</sup> Alasan yang sama memilih kandidat penantang karena kedekatan emosional, sama-sama aktif di kegiatan tarekat (PETA) disampaikan oleh pemilih laki-laki, Ketua RT 03 RW 05, usia 56 tahun, berpendidikan SD, berdagang dan buruh tani, dan tinggal di Desa Tunjung sudah 30 tahun (wawancara pada 3 September 2021); Pemilih laki-laki, tinggal di RT 01 RW 05 sejak lahir, usia 50 tahun, berpendidikan SMA, bekerja sebagai peternak bebek. (Wawancara pada 3 September 2021).

<sup>6</sup> Penjelasan yang senada disampaikan informan lain, yaitu laki-laki pemilih berusia 60 tahun, pengurus RT 03, bertani, tinggal di Desa Tentrem sejak lahir, dan penggiat seni di Desa Tentrem (wawancara 9 September 2021); laki-laki pemilih berusia 63 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir. Informan ini bahkan menyebutkan bahwa selama petahana menjabat bupati (2015-2020) mengunjungi Desa Tentrem 10 kali (wawancara 9 September 2021); laki-laki pemilih berusia 58 tahun, warga RT 03, bertani, dan tinggal di Desa Tentrem sejak lahir (wawancara 9 September 2021).

<sup>7</sup> Komisioner 2 KPUD juga menjelaskan fakta kedekatan pendukung kandidat penantang dari kalangan Muhammadiyah (secara tidak langsung diasosiasikan dengan Dukungan Partai Amanat Nasional/PAN kepada Kandidat Wakil Bupati Penantang) di Desa Tumpang dan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun. Kemenangan besar kandidat penantang di dua desa itu dikontribusi oleh kalangan warga Muhammadiyah (wawancara pada 9 September 2021). Merujuk rekap hasil Pilkada 2020 Kabupaten Blitar dari situs KPU RI, kandidat petahana memang memenangkan Pilkada 2020 di Kecamatan Talun dengan raihan 53,6 persen suara (18.883 suara). Namun, raihan suara kandidat penantang di Desa Tumpang dan Desa Kendalrejo, yang didukung pemilih dari kalangan Muhammadiyah, masing-masing mencapai 68 persen suara (1.931 suara) dan 60,13 persen suara (3.297 suara) dan merupakan raihan kemenangan tertinggi dibanding desa yang dimenangkan kandidat penantang lainnya di Kecamatan Talun, yaitu Kamulan (53,97 persen), Pasirharjo (58,26 persen), Jeblog (52,34 persen), dan Jajar (57,45 persen). Data ini mengonfirmasi kedekatan emosional pemilih dari kalangan Muhammadiyah dan kandidat penantang. Data rekap hasil Pilkada di Kecamatan Talun diunduh dari sumber:

<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/350514> diakses pada 5 April 2021.

<sup>8</sup> Pemberitaan tersebut di antaranya bisa dibaca dalam link berikut: <https://jatimtimes.com/baca/230611/20201207/163100/pelaku-politik-uang-di-kabupaten-blitar-tertangkap-di-dua-kecamatan> diakses pada 5 Maret 2021; <https://jatimtimes.com/baca/230611/20201207/163100/pelaku-politik-uang-di-kabupaten-blitar-tertangkap-di-dua-kecamatan> diakses pada 5 Maret 2021; <https://faktualnews.co/2020/12/07/bawaslu-blitar-selidiki-video-politik-uang-di-blitar/246121/> diakses pada 5 Maret 2021 <https://mediablitar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-321066204/pilkada-2020-semakin-dekat-bawaslu-temukan-kasus-dugaan-politik-uang-dan-pelanggaran-lainnya> diakses pada 5 Maret 2021; <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/314369/tim-pemenangan-paslon-no-urut-1-akan-laporkan-temuan-politik-uang-di-pilbup-blitar> diakses pada 5 Maret 2021; <https://duta.co/jual-beli-suara-di-pilkada-bupati-blitar-banyak-money-politik-terjadi> diakses pada 5 Maret 2021.

<sup>9</sup> Bukti dukungan terbuka dari organisasi otonom NU (Muslimat dan Fatayat) sekaligus pernyataan tokoh NU bahwa kandidat bupati penantang merupakan kader NU bisa diketahui dari pemberitaan media online dalam tautan: Sumber: <https://beritalangit.net/bergelombang-fatayat-blitar-dukung-mak-rini-makdhe-rahmat/> diakses pada 10 September 2021 dan Sumber: <https://beritalangit.net/menguat-barisan-muslimat-dukung-mak-rini-makdhe-rahmat/> diakses pada 10 September 2021.